



Optimalisasi Strategi Pengamanan Objek Vital Nasional oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Papua Tengah dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Regional

Jhosua Yudianto Halomoan¹, Baharuddin², Kristian H.P. Lambe³

^{1,2,3}) Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Submitted: 30-06-2026 || Review 07-07-2026 || Revision 20-07-2026 || Accepted 28-07-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas), mengidentifikasi ancaman keamanan regional, mengkaji faktor penghambat, serta merumuskan strategi optimal pengamanan Obvitnas oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Papua Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan unsur Ditpamobvit, TNI, pemerintah daerah, pengelola Obvitnas, tokoh masyarakat, dan personel pengamanan lapangan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan Obvitnas telah berjalan cukup baik melalui pola pengamanan terpadu dan kombinasi pendekatan preventif, pengawasan, serta deteksi dini. Namun, efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan personel, sarana prasarana, anggaran, kondisi geografis, serta koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi. Ancaman yang dihadapi bersifat multidimensional, meliputi gangguan kelompok bersenjata, konflik sosial, sabotase, dan penyebaran informasi yang berpotensi memicu instabilitas. Strategi optimal diarahkan pada penguatan sinergi lintas sektor, fungsi intelijen dan deteksi dini, kapasitas personel, teknologi pengamanan, serta pendekatan humanis kepada masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya sistem pengamanan yang adaptif dan kolaboratif sesuai dinamika keamanan regional Papua Tengah.

Kata kunci: Strategi Pengamanan; Objek Vital Nasional; Ditpamobvit; Keamanan Regional; Papua Tengah

Abstract

This study aims to analyze the current condition of National Vital Object (Obvitnas) security, identify regional security threats, examine the factors constraining security optimization, and formulate an optimal security strategy implemented by the Directorate of Vital Object Security (Ditpamobvit) of the Central Papua Regional Police. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation involving personnel from Ditpamobvit, the Indonesian National Armed Forces (TNI), local government, Obvitnas management, community leaders, and field security personnel. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that Obvitnas security in Central Papua has been implemented relatively well through an integrated security framework involving multiple stakeholders and combining preventive measures, monitoring, and early detection. However, its effectiveness remains suboptimal due to limitations in personnel, infrastructure, operational budgets,

¹E-mail: jhosuahalomoan@gmail.com

²E-mail: dr_baharuddin05@gmail.com

³E-mail: kristian_lambe@ukipaulus.ac.id

challenging geographical conditions, and interagency coordination and information exchange. The security threats are multidimensional, including armed group disturbances, social conflict, sabotage, and the dissemination of information that may trigger instability. The optimal strategy requires stronger cross-sectoral synergy, enhanced intelligence and early detection capabilities, improved personnel capacity, modern security technology, and a human-centered approach to community engagement. These findings highlight the importance of an adaptive and collaborative security system in responding to the dynamic regional security environment in Central Papua.

Keywords: Security Strategy; National Vital Objects; Ditpamobvit; Regional Security; Central Papua

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Objek Vital Nasional (Obvitnas) merupakan bagian strategis dari sistem keamanan nasional karena keberlangsungan operasionalnya berkaitan dengan kepentingan negara, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi. Gangguan terhadap objek strategis tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat menghambat kontinuitas pelayanan dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada keberadaan objek tersebut. Dalam konteks Indonesia, pengamanan Obvitnas merupakan bagian dari tanggung jawab keamanan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama unsur terkait. Kerangka normatif tersebut ditegaskan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemberian bantuan pengamanan pada Objek Vital Nasional dan objek tertentu, yang masih berstatus berlaku dan menjadi salah satu dasar penyelenggaraan bantuan pengamanan terhadap objek strategis (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019).

Perkembangan lingkungan strategis menunjukkan bahwa ancaman terhadap infrastruktur dan objek strategis semakin kompleks. Ancaman tidak lagi terbatas pada gangguan fisik, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk sabotase, gangguan sosial, gangguan terhadap sistem informasi dan komunikasi, serta berbagai bentuk disrupsi yang dapat mengganggu keberlanjutan operasional. Dalam perspektif *critical infrastructure resilience*, perlindungan infrastruktur strategis membutuhkan kemampuan untuk mengantisipasi risiko, merespons gangguan, mempertahankan fungsi utama, dan memulihkan operasional setelah terjadi gangguan. Ampratwum et al. (2022) menunjukkan bahwa ketahanan infrastruktur kritis sangat berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan pengelola infrastruktur, termasuk pembagian tanggung jawab, penilaian risiko, perencanaan ketahanan, dan pengembangan mekanisme kolaborasi. Dengan demikian, pengamanan objek strategis tidak dapat sepenuhnya mengandalkan satu institusi, tetapi membutuhkan integrasi kapasitas berbagai aktor yang memiliki sumber daya dan kewenangan berbeda.

Pendekatan kolaboratif tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks. Papua Tengah memiliki kondisi geografis yang mencakup kawasan pegunungan dan pesisir serta menghadapi keterbatasan akses transportasi pada sejumlah wilayah. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap mobilitas personel, distribusi sarana operasional, pengawasan lapangan, serta kecepatan respons ketika terjadi gangguan keamanan. Hasil penelitian dalam tesis menunjukkan bahwa karakteristik geografis tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengamanan Obvitnas di Papua Tengah. Oleh karena itu, strategi pengamanan yang efektif di Papua Tengah tidak dapat hanya mengadopsi pendekatan keamanan konvensional, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kapasitas operasional yang tersedia.

Kompleksitas tersebut juga berkaitan dengan karakter ancaman keamanan di Papua. Lingkungan keamanan di wilayah Papua memiliki dimensi yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan politik. Wangge (2023), dalam kajiannya mengenai sekuritisasi konflik politik di Papua Barat, menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang terlalu berorientasi pada dimensi keamanan dapat mengalami keterbatasan apabila tidak memperhatikan hubungan dengan masyarakat lokal. Perspektif tersebut penting dalam memahami pengamanan Obvitnas karena stabilitas lingkungan sekitar objek strategis tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aparat keamanan, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara institusi keamanan, pemerintah, pengelola objek, dan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan keamanan yang mengintegrasikan dimensi preventif, intelijen, koordinasi kelembagaan, serta komunikasi dengan masyarakat menjadi semakin relevan dalam konteks Papua Tengah.

Dalam perspektif *critical infrastructure protection*, kebutuhan terhadap kolaborasi lintas sektor juga semakin kuat. Ampratwum et al. (2022) menegaskan bahwa pembangunan ketahanan infrastruktur kritis membutuhkan keterlibatan pemerintah dan operator infrastruktur melalui mekanisme kemitraan yang jelas. Kolaborasi tersebut mencakup identifikasi risiko, penilaian kerentanan, perencanaan ketahanan, serta pembagian tanggung jawab antara aktor publik dan pengelola infrastruktur. Temuan tersebut memberikan dasar konseptual bahwa pengamanan Obvitnas seharusnya tidak diposisikan hanya sebagai tugas aparat keamanan, tetapi sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan kapasitas keamanan negara, pemerintah daerah, pengelola objek, dan masyarakat.

Dalam konteks Papua Tengah, kebutuhan tersebut menemukan relevansinya secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan Obvitnas telah berjalan melalui pola pengamanan terpadu yang melibatkan Ditpamobvit Polda Papua Tengah, satuan kewilayahan, serta pengelola objek vital. Pelaksanaan pengamanan dilakukan melalui kombinasi pengamanan terbuka dan tertutup, patroli, pengawasan, serta kegiatan intelijen dan pemantauan situasi keamanan. Dengan demikian, secara kelembagaan telah terdapat pola pengamanan yang mengarah pada pendekatan terpadu. Namun, keberadaan pola tersebut belum sepenuhnya menjamin optimalitas pengamanan karena masih terdapat keterbatasan kapasitas operasional.

Persoalan tersebut terlihat dari keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah Obvitnas yang harus diamankan. Selain itu, sarana dan prasarana seperti CCTV, perangkat komunikasi, dan kendaraan operasional masih membutuhkan peningkatan untuk mendukung mobilitas dan pengawasan di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang. Dari aspek kelembagaan, koordinasi antarinstansi pada dasarnya telah berjalan, tetapi masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi waktu respons dan distribusi informasi di lapangan. Dukungan anggaran juga dinilai masih perlu diperkuat, terutama untuk pengembangan teknologi, pelatihan personel, dan fasilitas operasional.

Persoalan pengamanan semakin kompleks karena bentuk ancaman yang dihadapi bersifat multidimensional. Berdasarkan hasil penelitian, ancaman terhadap Obvitnas di Papua Tengah meliputi gangguan kelompok bersenjata, sabotase, gangguan sosial, serta potensi konflik horizontal. Ancaman tersebut juga memiliki dimensi nonfisik, antara lain gangguan psikologis masyarakat dan penyebaran informasi yang dapat meningkatkan ketegangan sosial. Dengan karakter ancaman semacam itu, sistem pengamanan yang hanya berorientasi pada penjagaan fisik menjadi kurang memadai. Diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan deteksi dini, pengumpulan dan

pertukaran informasi, koordinasi lintas institusi, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan sosial kepada masyarakat.

Tabel 1. Fenomena dan Permasalahan Pengamanan Obvitnas di Papua Tengah

Dimensi	Kondisi/Fakta Empiris	Implikasi terhadap Pengamanan
Pola pengamanan	Pengamanan telah dilaksanakan melalui pola terpadu yang melibatkan Polri, TNI, pemerintah daerah, dan pengelola Obvitnas	Mebutuhkan koordinasi lintas institusi yang konsisten
Personel	Jumlah personel masih terbatas dibandingkan luas wilayah dan jumlah Obvitnas	Membatasi cakupan dan fleksibilitas pengamanan lapangan
Geografis	Wilayah memiliki medan sulit, akses transportasi terbatas, dan tantangan mobilitas	Memperlambat mobilitas dan respons terhadap gangguan
Sarana dan prasarana	Masih diperlukan peningkatan CCTV, perangkat komunikasi, dan kendaraan operasional	Membatasi kemampuan pengawasan dan respons cepat
Ancaman	Ancaman meliputi gangguan kelompok bersenjata, sabotase, konflik sosial, dan ancaman nonfisik	Mebutuhkan sistem pengamanan yang adaptif dan multidimensional
Koordinasi	Koordinasi antarlembaga telah berjalan, tetapi sinkronisasi respons dan distribusi informasi masih menghadapi tantangan	Berpotensi memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan dan respons
Teknologi	Pemanfaatan teknologi pengawasan dan komunikasi masih perlu diperkuat	Menunjukkan kebutuhan modernisasi sistem pengamanan
Masyarakat	Masyarakat diposisikan sebagai mitra dalam menjaga stabilitas keamanan	Mebutuhkan pendekatan komunikasi dan pelibatan masyarakat secara berkelanjutan

Sumber: Diolah dari hasil pengamatan penulis (2026)

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengamanan Obvitnas di Papua Tengah bukan semata-mata persoalan **kekurangan personel atau peralatan**, melainkan persoalan kapasitas sistem pengamanan secara keseluruhan. Ancaman yang dihadapi bersifat multidimensional, meliputi gangguan kelompok bersenjata, sabotase, konflik sosial, konflik horizontal, serta ancaman nonfisik berupa penyebaran informasi yang berpotensi memicu ketegangan. Kondisi tersebut menuntut perubahan orientasi dari pengamanan yang dominan bersifat *reactive security* menuju pengamanan yang lebih *preventive, intelligence-driven, collaborative, adaptive, dan community-oriented*.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa strategi optimal pengamanan Obvitnas tidak dapat hanya diarahkan pada peningkatan jumlah personel. Strategi yang diperlukan mencakup penguatan sinergi Polri, TNI, pemerintah daerah, dan pengelola Obvitnas; optimalisasi fungsi intelijen untuk deteksi dini; peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan berkelanjutan; pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan sistem komunikasi terpadu; serta pendekatan humanis melalui komunikasi dan pelibatan tokoh lokal. Pendekatan semacam ini konsisten dengan perkembangan literatur *critical infrastructure resilience* yang menekankan bahwa ketahanan infrastruktur strategis membutuhkan koordinasi antarpemangku kepentingan dan distribusi tanggung jawab yang jelas (Ampratwum et al., 2022).

Menariknya, penelitian mengenai pengamanan Obvitnas di Indonesia selama ini lebih banyak diarahkan pada aspek normatif, implementasi regulasi, atau pengamanan objek tertentu. Misalnya, penelitian Syahputra et al. (2024) mengenai pengamanan PT Pertamina Hulu Rokan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengamanan Obvitnas dilakukan melalui kerja sama antara pengelola objek dan Direktorat Pam Obvit Polda Riau berdasarkan perjanjian kerja sama dan pedoman kerja teknis. Penelitian semacam ini memberikan dasar penting mengenai implementasi sistem pengamanan Obvitnas, tetapi masih terdapat ruang penelitian untuk memahami bagaimana strategi pengamanan dioperasikan pada wilayah yang menghadapi kombinasi ancaman keamanan, keterbatasan sumber daya, tantangan geografis, dan kompleksitas relasi sosial seperti Papua Tengah.

Dengan demikian, *research gap* penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjelaskan secara empiris bagaimana strategi pengamanan Obvitnas dijalankan dalam konteks keamanan regional yang kompleks, faktor apa saja yang menghambat optimalisasinya, serta bagaimana strategi tersebut dapat dikembangkan menjadi sistem pengamanan yang lebih adaptif. Fokus ini menjadi penting karena pendekatan pengamanan yang efektif di wilayah dengan tingkat kompleksitas rendah belum tentu dapat diterapkan secara langsung pada wilayah seperti Papua Tengah. Bahkan, literatur tentang konflik Papua memperlihatkan bahwa respons keamanan perlu mempertimbangkan dimensi sosial dan hubungan dengan masyarakat lokal, bukan hanya dimensi penegakan keamanan secara koersif (Wangge, 2023).

Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk membangun model pengamanan Obvitnas yang mampu menjembatani tuntutan perlindungan terhadap objek strategis dengan karakter ancaman dan kondisi operasional spesifik Papua Tengah. Secara praktis, gangguan terhadap Obvitnas berpotensi tidak hanya menghambat aktivitas perusahaan, tetapi juga memengaruhi pelayanan publik, investasi, aktivitas ekonomi, dan pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengamanan yang ada telah berjalan cukup baik, tetapi masih menghadapi keterbatasan sumber daya, teknologi, geografis, serta koordinasi antarlembaga. Karena itu, penelitian ini penting untuk menghasilkan pemahaman empiris mengenai bagaimana Ditpamobvit Polda Papua Tengah dapat mengoptimalkan strategi pengamanan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, intelijen dan deteksi dini, kapasitas personel, teknologi pengamanan, serta pendekatan humanis. Secara akademik, penelitian ini juga memperluas kajian *critical infrastructure protection* dengan menghadirkan bukti empiris dari konteks daerah yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan keamanan yang berbeda dari konteks pengamanan infrastruktur strategis pada umumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana strategi pengamanan Objek Vital Nasional yang dilaksanakan oleh Ditpamobvit Polda Papua Tengah dalam menghadapi ancaman keamanan regional?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam optimalisasi pengamanan Objek Vital Nasional di wilayah Papua Tengah?
3. Bagaimana strategi optimal dan adaptif yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan Objek Vital Nasional oleh Ditpamobvit

Polda Papua Tengah dalam menghadapi dinamika ancaman keamanan regional?

TINJAUAN LITERATUR

Objek Vital Nasional

Objek Vital Nasional merupakan kawasan, wilayah, bangunan, instalasi, dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Karakter strategis tersebut menyebabkan gangguan terhadap Obvitnas memiliki konsekuensi yang lebih luas dibandingkan gangguan terhadap objek biasa. Oleh karena itu, perlindungan Obvitnas perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan keamanan yang bertujuan menjaga kontinuitas fungsi strategis dan mencegah terjadinya gangguan terhadap kepentingan nasional.

Dalam konteks kelembagaan Indonesia, pengamanan Obvitnas melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aktor utama. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 mengatur pemberian bantuan pengamanan terhadap Obvitnas dan objek tertentu serta menempatkan pengamanan sebagai suatu proses yang membutuhkan sistem, prosedur, dan koordinasi antara aparat kepolisian dengan pihak pengelola objek (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019). Dengan demikian, pengamanan Obvitnas pada dasarnya bukan sekadar aktivitas penjagaan fisik, tetapi merupakan suatu mekanisme manajemen keamanan yang mencakup pencegahan, pengawasan, deteksi, dan respons terhadap potensi gangguan.

Pemahaman tersebut sejalan dengan perkembangan konsep *critical infrastructure protection*. Infrastruktur atau objek strategis memiliki keterkaitan dengan berbagai sistem sosial dan ekonomi sehingga gangguan terhadap satu komponen dapat menghasilkan dampak yang lebih luas. Dalam perspektif *critical infrastructure resilience*, perlindungan tidak hanya diarahkan untuk mencegah gangguan, tetapi juga memastikan kemampuan sistem untuk menghadapi, menyerap, merespons, dan memulihkan diri dari gangguan. Ampratwum et al. (2022) menegaskan bahwa ketahanan infrastruktur kritis membutuhkan keterlibatan pemerintah dan operator infrastruktur melalui mekanisme kolaborasi yang memungkinkan pembagian tanggung jawab, penilaian risiko, dan pengembangan rencana ketahanan.

Dengan demikian, konsep Obvitnas dalam penelitian ini dipahami sebagai objek strategis yang memerlukan sistem perlindungan terintegrasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi dan mencegah gangguan terhadap kepentingan negara, masyarakat, dan aktivitas ekonomi. Konsep tersebut menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana Ditpamobvit Polda Papua Tengah menjalankan strategi pengamanan dalam lingkungan yang memiliki karakteristik ancaman dan geografis yang kompleks.

Strategi Pengamanan Objek Vital Nasional

Strategi pengamanan dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan terencana yang diarahkan untuk mencapai kondisi keamanan tertentu dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks pengamanan Obvitnas, strategi tidak hanya berkaitan dengan penempatan personel, tetapi mencakup proses identifikasi ancaman, penilaian kerawanan, pencegahan, deteksi dini, koordinasi, pengawasan, respons, dan evaluasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditpamobvit Polda Papua Tengah menerapkan kombinasi pengamanan terbuka dan tertutup. Pengamanan terbuka

dilakukan melalui penjagaan langsung pada objek, sedangkan pengamanan tertutup dilakukan melalui kegiatan intelijen dan pemantauan situasi keamanan. Pendekatan tersebut dilengkapi dengan patroli, pengawasan, dan deteksi dini terhadap potensi gangguan. Dengan demikian, strategi pengamanan dalam penelitian ini memiliki dimensi preventif, represif terbatas, intelijen, dan koordinatif.

Strategi tersebut menjadi semakin penting karena ancaman terhadap objek strategis tidak selalu dapat diamati secara langsung. Deteksi dini memungkinkan aparat mengidentifikasi indikasi gangguan sebelum berkembang menjadi ancaman aktual. Dalam perspektif kepolisian modern, kemampuan memperoleh dan mengolah informasi dari berbagai sumber merupakan elemen penting dalam pencegahan ancaman. Summers (2020), misalnya, menunjukkan bahwa pendekatan *community policing* dan *intelligence-led policing* tidak harus diposisikan sebagai dua pendekatan yang berlawanan. Keduanya dapat dikombinasikan untuk menghasilkan informasi berbasis masyarakat yang mendukung tindakan preventif dan meningkatkan kemampuan deteksi terhadap potensi ancaman.

Oleh sebab itu, strategi pengamanan Obvitnas dalam penelitian ini dipahami sebagai proses sistematis untuk mengantisipasi, mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman melalui kombinasi personel, intelijen, teknologi, prosedur pengamanan, koordinasi kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat.

Ancaman Keamanan terhadap Objek Vital Nasional

Ancaman keamanan merupakan kondisi, tindakan, atau aktivitas yang memiliki potensi mengganggu keamanan, keselamatan, kontinuitas operasional, maupun fungsi strategis suatu objek. Karakter ancaman terhadap Obvitnas semakin berkembang dari ancaman fisik menuju ancaman multidimensional.

Dalam penelitian ini, ancaman keamanan yang ditemukan meliputi gangguan kelompok bersenjata, sabotase, gangguan sosial, potensi konflik horizontal, serta ancaman nonfisik seperti penyebaran informasi yang dapat memicu ketegangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap Obvitnas di Papua Tengah memiliki karakter dinamis, kompleks, dan multidimensional.

Perspektif *critical infrastructure resilience* mendukung pemahaman tersebut. Ampratwum et al. (2022) menjelaskan bahwa ketahanan infrastruktur kritis harus memperhitungkan berbagai risiko dan gangguan yang dapat memengaruhi keberlanjutan fungsi infrastruktur. Bahkan, pendekatan sistem terhadap ketahanan infrastruktur menuntut identifikasi berbagai ancaman dan kerentanan serta koordinasi lintas sektor antara pemerintah dan operator infrastruktur.

Dalam konteks Papua, karakter ancaman juga tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial dan politik. Wangge (2023) menunjukkan bahwa konflik di Papua memiliki dimensi politik dan sosial yang kompleks sehingga pendekatan keamanan yang hanya mengandalkan perspektif koersif memiliki keterbatasan. Hal tersebut memberikan implikasi bahwa pengamanan Obvitnas di wilayah Papua Tengah perlu memperhatikan lingkungan sosial di sekitar objek, termasuk hubungan antara aparat keamanan, pemerintah, pengelola objek, dan masyarakat.

Dengan demikian, ancaman keamanan dalam penelitian ini tidak dipahami hanya sebagai ancaman fisik terhadap objek, tetapi sebagai spektrum gangguan yang dapat muncul dari dimensi keamanan, sosial, informasi, geografis, dan kelembagaan.

Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pengamanan Obvitnas

Kolaborasi lintas sektor merupakan salah satu konsep utama yang relevan dengan pengamanan Obvitnas. Kompleksitas ancaman menyebabkan satu institusi tidak selalu memiliki seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pengamanan secara efektif. Dalam kondisi tersebut, diperlukan integrasi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, pengelola Obvitnas, serta masyarakat.

Ampratwum et al. (2022) menunjukkan bahwa *critical infrastructure resilience* membutuhkan pengurangan sekat sektoral (*traditional silos*) dan pembentukan jaringan kolaboratif antara pemerintah dan operator infrastruktur. Kolaborasi tersebut memungkinkan para aktor menggabungkan sumber daya, informasi, pengetahuan, dan kapasitas untuk menghadapi risiko secara lebih efektif.

Perspektif tersebut juga diperkuat oleh OECD (2019), yang menekankan bahwa ketahanan infrastruktur kritis memerlukan pendekatan berbasis sistem dan koordinasi lintas sektor, termasuk antara pemerintah dan operator swasta. OECD juga menempatkan kepercayaan, pertukaran informasi yang aman, mekanisme tata kelola, dan pembagian tanggung jawab sebagai elemen penting dalam membangun kolaborasi keamanan infrastruktur.

Dalam konteks penelitian ini, kolaborasi lintas sektor tercermin melalui keterlibatan Ditpamobvit Polda Papua Tengah, TNI, pemerintah daerah, pengelola Obvitnas, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga telah berjalan, tetapi masih menghadapi persoalan sinkronisasi waktu respons dan distribusi informasi. Dengan demikian, keberadaan banyak aktor belum otomatis menghasilkan kolaborasi yang optimal. Tantangan utama justru terletak pada bagaimana membangun integrasi informasi, kejelasan peran, kecepatan respons, dan mekanisme koordinasi yang efektif.

Intelijen dan Deteksi Dini

Intelijen dan deteksi dini merupakan komponen penting dalam strategi pengamanan Obvitnas karena memungkinkan aparat memperoleh informasi mengenai potensi gangguan sebelum berkembang menjadi ancaman aktual. Pendekatan ini menggeser orientasi pengamanan dari respons setelah kejadian menuju pencegahan berbasis informasi.

Dalam penelitian ini, fungsi intelijen ditempatkan sebagai bagian dari pengamanan tertutup dan digunakan untuk memantau perkembangan situasi keamanan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa karakter ancaman di Papua Tengah membutuhkan pendekatan intelijen dan penegakan hukum secara terukur. Hal ini semakin relevan karena ancaman tidak selalu berbentuk serangan langsung, tetapi dapat berkembang melalui dinamika sosial dan penyebaran informasi yang meningkatkan ketegangan.

Summers (2020) menunjukkan bahwa hubungan antara *community policing* dan *intelligence-led policing* dapat memberikan manfaat dalam pencegahan ancaman. Keterlibatan masyarakat memungkinkan kepolisian memperoleh informasi yang lebih dekat dengan kondisi sosial, sementara kemampuan intelijen memungkinkan informasi tersebut dianalisis untuk menghasilkan tindakan preventif.

Berdasarkan perspektif tersebut, intelijen dan deteksi dini dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pengumpulan informasi oleh aparat, tetapi sebagai mekanisme untuk mengubah informasi mengenai potensi gangguan menjadi dasar pengambilan keputusan preventif.

Pemanfaatan Teknologi dalam Pengamanan

Perkembangan teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan respons terhadap ancaman keamanan. Teknologi seperti CCTV, perangkat komunikasi, sistem pemantauan, dan integrasi informasi memungkinkan aparat melakukan pengawasan secara lebih luas dan memperoleh informasi secara lebih cepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pengamanan di Papua Tengah telah tersedia, tetapi masih membutuhkan peningkatan, terutama CCTV, perangkat komunikasi, dan kendaraan operasional. Keterbatasan tersebut menjadi signifikan karena kondisi geografis Papua Tengah menyebabkan pengawasan dan mobilitas personel menghadapi tantangan tersendiri.

Dalam konteks ketahanan infrastruktur, teknologi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem yang melibatkan manusia, organisasi, informasi, dan infrastruktur. Ganguly dan Mukherjee (2022), misalnya, menunjukkan bahwa penilaian kerentanan infrastruktur perlu mempertimbangkan keterkaitan antar-infrastruktur dan kebutuhan pertukaran informasi untuk mengurangi risiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Meskipun kajian tersebut berfokus pada kerentanan infrastruktur, prinsipnya relevan untuk pengamanan Obvitnas, yaitu bahwa teknologi akan memberikan manfaat optimal apabila didukung oleh integrasi informasi dan koordinasi antaraktor.

Dengan demikian, teknologi dalam penelitian ini diposisikan sebagai **enabler** bagi pengawasan, komunikasi, deteksi dini, dan respons keamanan, bukan sebagai pengganti kapasitas manusia dan kelembagaan.

Pendekatan Humanis dan Keterlibatan Masyarakat

Pendekatan humanis merupakan aspek penting dalam pengamanan pada wilayah yang memiliki kompleksitas sosial dan budaya. Masyarakat bukan hanya pihak yang menjadi sasaran pengamanan, tetapi dapat berfungsi sebagai mitra dalam mendeteksi potensi gangguan, membangun komunikasi, dan mencegah konflik.

Karreth (2020) menunjukkan bahwa kepercayaan antarkelompok memiliki peran penting dalam keberhasilan *community policing* pada masyarakat yang beragam. Kepercayaan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan keamanan dan penyelesaian masalah kolektif. Temuan tersebut relevan dengan konteks Papua Tengah karena hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat dapat memengaruhi efektivitas memperoleh informasi serta mencegah eskalasi konflik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan. Pendekatan sosial dan komunikasi yang baik dinilai membantu mencegah konflik, sementara penguatan hubungan dengan masyarakat dipandang sebagai bagian dari strategi pengamanan ke depan.

Dengan demikian, pendekatan humanis dalam pengamanan Obvitnas dapat dipahami sebagai strategi membangun kepercayaan, komunikasi, partisipasi, dan dukungan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pencegahan gangguan keamanan.

Optimalisasi Strategi Pengamanan Obvitnas

Berdasarkan sintesis literatur dan temuan penelitian, optimalisasi strategi pengamanan Obvitnas tidak cukup dipahami sebagai penambahan sumber daya.

Optimalisasi merupakan proses meningkatkan efektivitas sistem melalui kombinasi *people, process, technology, intelligence, coordination, dan community engagement*.

Kerangka tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2. Kerangka Optimalisasi Pengamanan Obvitnas

Komponen Optimalisasi	Fokus Strategis	Relevansi Empiris
Personel	Penempatan berdasarkan tingkat kerawanan dan peningkatan kompetensi	Keterbatasan jumlah personel
Intelijen	Pengumpulan informasi dan deteksi dini	Ancaman bersifat dinamis
Koordinasi	Integrasi informasi dan sinkronisasi respons	Masih terdapat kendala koordinasi
Teknologi	CCTV, komunikasi, dan sistem pengawasan	Infrastruktur teknologi masih perlu diperkuat
Kolaborasi	Sinergi Polri, TNI, pemerintah, pengelola Obvitnas	Ancaman membutuhkan respons lintas sektor
Masyarakat	Komunikasi, kepercayaan, dan partisipasi	Pendekatan humanis diperlukan untuk pencegahan konflik
Adaptabilitas	Penyesuaian strategi berdasarkan dinamika ancaman dan wilayah	Karakter ancaman Papua Tengah bersifat multidimensional

Secara konseptual, pendekatan tersebut sejalan dengan literatur *critical infrastructure resilience* yang menempatkan koordinasi, kolaborasi, penilaian risiko, dan pembagian tanggung jawab sebagai elemen penting dalam membangun ketahanan infrastruktur (Ampratwum et al., 2022). OECD (2019) juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai sektor dan aktor dalam menghadapi ancaman terhadap infrastruktur kritis.

Oleh karena itu, penelitian ini memandang optimalisasi strategi pengamanan Obvitnas sebagai proses penguatan kapasitas sistem pengamanan melalui integrasi sumber daya manusia, intelijen, teknologi, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat untuk menghasilkan sistem pengamanan yang preventif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ancaman keamanan regional.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian literatur dan temuan awal penelitian, hubungan konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui **gambar 1** berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam strategi pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Papua Tengah dalam menghadapi ancaman keamanan regional. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, proses, pengalaman, dan dinamika sosial yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris pengamanan Obvitnas, bentuk ancaman, hambatan operasional, koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi, dan strategi optimalisasi berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat secara langsung. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini relevan dengan karakter permasalahan penelitian yang kompleks dan kontekstual, karena pengamanan Obvitnas di Papua Tengah dipengaruhi oleh faktor keamanan, geografis, sosial, kelembagaan, dan ketersediaan sumber daya.

Penelitian dilaksanakan di Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Papua Tengah sebagai institusi utama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengamanan Obvitnas di wilayah hukum Polda Papua Tengah. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan pada beberapa Obvitnas yang merepresentasikan sektor strategis, yaitu sektor pertambangan, energi, telekomunikasi, dan transportasi.

Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi lokasi dengan fokus penelitian, keberadaan objek strategis, kompleksitas ancaman keamanan, kondisi geografis yang menantang, serta kebutuhan untuk memperoleh data empiris mengenai strategi pengamanan dan koordinasi lintas sektor. Secara administratif dan akademik, tesis yang menjadi sumber penelitian ini diselesaikan pada Januari 2026, sedangkan dokumen tesis tidak mencantumkan secara eksplisit rentang bulan pelaksanaan pengumpulan data lapangan. Karena itu, artikel ini tidak menetapkan periode penelitian yang lebih spesifik daripada yang dapat diverifikasi dari sumber penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi dan sampel tidak digunakan dalam pengertian statistik sebagaimana penelitian kuantitatif. Unit sumber data penelitian ini adalah para pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kewenangan, dan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam sistem pengamanan Obvitnas di Papua Tengah. Pemilihan sumber data dilakukan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi posisi, kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan terhadap fenomena yang diteliti. Moleong (2022) menjelaskan bahwa informan penelitian kualitatif dipilih secara sengaja karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam tesis, rancangan awal menyebutkan bahwa jumlah informan ditentukan berdasarkan kecukupan data atau *data saturation*, dengan estimasi 8 sampai 10 informan. Namun, pada pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil akhirnya, data diperoleh dari tujuh informan yang dinilai telah memberikan informasi yang relevan dan mendalam terhadap fokus penelitian.

Ketujuh informan tersebut merepresentasikan unsur internal dan eksternal dalam sistem pengamanan Obvitnas, yaitu Direktur Pamobvit Polda Papua Tengah sebagai penanggung jawab kebijakan dan strategi pengamanan; Kasubbag Renmin Ditpamobvit sebagai unsur perencana dan pengelola administrasi pengamanan; personel pengamanan Obvit sebagai pelaksana teknis di lapangan; pengelola PT Pertamina (Fuel) sebagai representasi pengelola Obvitnas sektor energi; tokoh masyarakat lokal sebagai representasi perspektif sosial masyarakat; personel TNI sebagai unsur pendukung pengamanan dan stabilisasi keamanan wilayah; serta unsur pemerintah daerah sebagai pihak yang berperan dalam koordinasi kebijakan keamanan daerah. Komposisi tersebut memungkinkan penelitian memperoleh perspektif yang beragam mengenai strategi pengamanan, ancaman, hambatan, koordinasi, dan kebutuhan optimalisasi sistem pengamanan Obvitnas.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan format semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pengamanan Obvitnas, bentuk ancaman keamanan, hambatan operasional, koordinasi antarinstansi, serta strategi optimalisasi yang dilakukan Ditpamobvit Polda Papua Tengah. Observasi dilakukan pada beberapa lokasi Obvitnas untuk mengamati kondisi pengamanan secara langsung, termasuk kesiapan personel, sistem penjagaan dan patroli, akses masuk-keluar, ketersediaan CCTV dan fasilitas keamanan, serta penggunaan teknologi pengawasan. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung untuk melengkapi dan memverifikasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Penggunaan ketiga teknik tersebut memungkinkan peneliti membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Secara metodologis, penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi juga konsisten dengan praktik penelitian

kualitatif yang menempatkan berbagai sumber data sebagai sarana untuk memahami fenomena secara kontekstual (Creswell & Poth, 2018).

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan secara interaktif sejak proses pengumpulan data berlangsung sehingga interpretasi terhadap temuan dapat terus dikembangkan berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan fokus penelitian, terutama strategi pengamanan, ancaman keamanan regional, faktor penghambat, koordinasi lintas sektor, kebutuhan sumber daya, dan strategi optimalisasi. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif dan pengelompokan kategori sehingga hubungan antartema dapat diidentifikasi. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berulang dengan membandingkan temuan antarsumber dan antarjenis data. Pendekatan analisis tersebut sesuai dengan karakter analisis kualitatif yang menempatkan proses interpretasi sebagai aktivitas yang berlangsung secara iteratif, bukan sebagai tahapan yang sepenuhnya linear (Miles et al., 2020).

Untuk memastikan kredibilitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, member check, dan audit trail. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari unsur kepolisian, personel lapangan, pengelola Obvitnas, TNI, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap fenomena yang sama. Selanjutnya, *member check* digunakan untuk mengonfirmasi kembali informasi atau interpretasi tertentu kepada informan, sedangkan *audit trail* dilakukan dengan mendokumentasikan proses pengumpulan data, transkrip, catatan lapangan, proses analisis, perubahan kategori, dan proses penarikan kesimpulan. Strategi tersebut digunakan untuk meningkatkan kredibilitas, keterlacakan, dan konsistensi interpretasi penelitian.

Secara keseluruhan, desain metodologis tersebut memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman yang kontekstual mengenai bagaimana strategi pengamanan Obvitnas dilaksanakan, bagaimana ancaman keamanan regional dipersepsikan dan direspons, faktor apa yang menghambat optimalisasi, serta strategi apa yang diperlukan untuk membangun sistem pengamanan yang lebih adaptif dan kolaboratif di Papua Tengah. Pendekatan ini juga sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menempatkan kedalaman informasi, konteks lapangan, dan perspektif aktor sebagai dasar utama dalam menghasilkan interpretasi terhadap fenomena sosial dan kelembagaan (Braun & Clarke, 2021; Creswell & Poth, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Papua Tengah sebagai institusi yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) di wilayah hukum Polda Papua Tengah. Polda Papua Tengah merupakan satuan kewilayahan Polri yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada wilayah dengan karakter geografis dan dinamika keamanan yang kompleks. Wilayah hukumnya mencakup kawasan pegunungan dan pesisir dengan akses transportasi yang

pada sejumlah lokasi masih terbatas. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi mobilitas personel, pola patroli, distribusi sarana operasional, serta kecepatan respons terhadap potensi gangguan keamanan.

Dalam pelaksanaan pengamanan Obvitnas, Ditpamobvit tidak bekerja secara eksklusif, tetapi berada dalam suatu sistem yang melibatkan satuan kewilayahan Polri, TNI, pemerintah daerah, pengelola Obvitnas, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek yang menjadi konteks penelitian mencakup sektor strategis seperti pertambangan, energi, telekomunikasi, dan transportasi. Pemilihan konteks tersebut didasarkan pada karakter strategis objek sekaligus tingkat kerawanan dan tantangan geografis yang dihadapi dalam proses pengamanannya.

Secara operasional, pengamanan Obvitnas di Papua Tengah telah menggunakan pola pengamanan terpadu dengan orientasi preventif. Strategi yang diterapkan mencakup pengamanan terbuka melalui penjagaan langsung, pengamanan tertutup melalui fungsi intelijen dan pemantauan, patroli, pengawasan, serta deteksi dini. Direktur Pamobvit menjelaskan bahwa pola pengamanan merupakan kombinasi antara pengamanan terbuka dan tertutup, sedangkan kegiatan pengamanan difokuskan pada peningkatan patroli, pengawasan, dan deteksi dini terhadap potensi gangguan. Dengan demikian, objek penelitian memperlihatkan adanya sistem pengamanan yang secara kelembagaan telah bergerak dari pendekatan penjagaan fisik menuju pendekatan yang mengintegrasikan pencegahan, intelijen, koordinasi, dan pengawasan.

Karakteristik Informan Penelitian

Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan, kewenangan, pengalaman, dan pengetahuan mereka mengenai pengamanan Obvitnas. Oleh karena itu, karakteristik yang paling relevan bukan usia atau jenis kelamin, melainkan posisi kelembagaan dan perspektif yang mereka representasikan. Tesis tidak menyediakan data demografis seperti usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan masa kerja seluruh informan. Untuk menjaga integritas data, variabel tersebut tidak direkonstruksi atau diada-adakan dalam artikel ini.

Penelitian melibatkan tujuh informan yang merepresentasikan unsur kepolisian, TNI, pengelola Obvitnas, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Komposisi tersebut memberikan variasi perspektif yang memungkinkan triangulasi terhadap kondisi pengamanan, ancaman, faktor penghambat, serta strategi optimalisasi.

Tabel 3. Karakteristik Informan Penelitian

No. Informan	Jabatan/Instansi	Kategori Stakeholder	Peran dalam Penelitian
1 Kombes Pol. Kariawan Barus, S.I.K., M.H.	Direktur Pamobvit Polda Papua Tengah	Polri	Penanggung jawab kebijakan dan strategi pengamanan Obvitnas
2 AKP I Made Sudarma, S.H.	Kasubbag Renmin Ditpamobvit Polda Papua Tengah	Polri	Perencanaan dan administrasi pengamanan
3 AIPTU David Tangkedatu	Personel Pengamanan Obvit Ditpamobvit Polda Papua Tengah	Polri	Pelaksana pengamanan di lapangan
4 Subekan Eko Nugroho	PT Pertamina (Fuel)	Pengelola Obvitnas	Pengelola dan penanggung jawab Obvitnas sektor energi

No. Informan	Jabatan/Instansi	Kategori Stakeholder	Peran dalam Penelitian
5 Raymond Sabandar	Tokoh Masyarakat Lokal	Masyarakat	Representasi perspektif dan kondisi sosial masyarakat
6 Lettu Agus J. S	TNI, Satuan Tugas Pengamanan Wilayah	TNI	Dukungan pengamanan dan stabilisasi keamanan wilayah
7 Arse Lamba	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	Representasi koordinasi kebijakan keamanan daerah

Sumber: Diolah dari data penelitian (2026)

Komposisi informan tersebut menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya memperoleh perspektif dari institusi keamanan, tetapi juga dari pihak yang berada di luar struktur kepolisian. Hal ini penting karena pengamanan Obvitnas merupakan fenomena lintas kelembagaan. Informasi dari Direktur Pamobvit dan personel lapangan menggambarkan perspektif internal, sedangkan TNI, pengelola Obvitnas, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat memberikan perspektif eksternal. Dengan demikian, temuan yang diperoleh dapat menggambarkan hubungan antara kebijakan pengamanan, implementasi lapangan, kebutuhan pengelola objek, kondisi sosial, serta dukungan antarlembaga.

Hasil Analisis Tematik

Analisis tematik terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menghasilkan sejumlah tema utama yang secara langsung menjawab fokus penelitian. Tema-tema tersebut kemudian dikelompokkan menjadi lima kategori utama, yaitu (1) implementasi strategi pengamanan, (2) dinamika ancaman keamanan, (3) faktor penghambat, (4) kolaborasi dan peran stakeholder, serta (5) strategi optimalisasi pengamanan.

Tabel 4. Analisis Tematik Pengamanan Obvitnas di Papua Tengah

Tema Utama	Kode/Kategori Temuan	Bukti Empiris dari Wawancara	Interpretasi Tematik
1. Implementasi strategi pengamanan	Pengamanan terpadu; pengamanan terbuka; pengamanan tertutup; patroli; pengawasan; deteksi dini	Direktur Pamobvit menyatakan bahwa Strategi pengamanan dilaksanakan telah melalui “pola pengamanan terpadu” dengan kombinasi pengamanan terbuka dan penjagaan fisik tertutup.	pengamanan menggunakan pendekatan preventif dan terpadu, tidak hanya pengamanan fisik
2. Dinamika ancaman keamanan	Kelompok bersenjata; sabotase; konflik sosial; konflik horizontal; ancaman informasi	Direktur Pamobvit menyebut gangguan kelompok bersenjata, sabotase, gangguan sosial, dan konflik dinamis serta ancaman nonfisik berupa penyebaran informasi.	bersifat multidimensional dan sehingga membutuhkan respons adaptif

Tema Utama	Kode/Kategori Temuan	Bukti Empiris dari Wawancara	Interpretasi Tematik
3. Keterbatasan sumber daya	Kekurangan personel; sarana prasarana; akses geografis; anggaran	Direktur Pamobvit menyebut jumlah personel terbatas dan sarana teknologi seperti CCTV, perangkat komunikasi, serta kendaraan operasional masih perlu ditingkatkan.	Kapasitas sumber daya belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah, jumlah objek, dan tingkat kerawanan
4. Koordinasi dan integrasi informasi	Koordinasi TNI-Polri; pertukaran informasi; sinkronisasi respons; integrasi data	Informan TNI menyatakan koordinasi berjalan baik, tetapi masih diperlukan peningkatan kecepatan respons dan integrasi informasi.	Persoalan utama bukan ketiadaan koordinasi, melainkan kualitas integrasi informasi dan kecepatan respons
5. Kolaborasi stakeholder	Polri; pemerintah daerah; perusahaan; masyarakat	Pengelola PT Pertamina menyatakan kerja sama dilakukan melalui pengamanan terpadu, patroli bersama, dan koordinasi rutin.	Pengamanan Obvitnas merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan pembagian peran antarpemangku kepentingan
6. Intelijen dan deteksi dini	Pemetaan kerawanan; intelijen; informasi awal; pencegahan	Informan TNI menilai intelijen penting untuk menyediakan informasi awal sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat.	Penguatan intelijen merupakan fondasi pergeseran dari respons reaktif menuju pencegahan
7. Teknologi pengamanan	CCTV terintegrasi; komunikasi digital; monitoring; command center	Informan menyarankan CCTV terintegrasi, sistem komunikasi digital, pemantauan berbasis data, dan sistem terpadu berbasis command center.	Teknologi diperlukan untuk memperluas jangkauan pengawasan dan mempercepat aliran informasi
8. Pendekatan humanis	Komunikasi; dialog; tokoh adat; tokoh masyarakat; partisipasi masyarakat	Tokoh masyarakat mengharapkan pendekatan yang lebih humanis dan dialogis serta pelibatan tokoh adat dan masyarakat.	Masyarakat diposisikan sebagai mitra dalam deteksi dini dan pemeliharaan stabilitas
9. Strategi optimalisasi	Sinergi lintas sektor; kapasitas personel; teknologi; intelijen; koordinasi terpadu	Temuan penelitian merekomendasikan penguatan sinergi Polri, TNI, pemerintah daerah, pengelola Obvitnas, intelijen, teknologi, dan pendekatan humanis.	Optimalisasi membutuhkan integrasi people, technology, intelligence, coordination, dan community engagement

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penelitian (2026)

Strategi Pengamanan Obvitnas yang Dilaksanakan Ditpamobvit Polda Papua Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengamanan Obvitnas telah berjalan cukup baik dan terstruktur, tetapi belum sepenuhnya optimal. Strategi tersebut dibangun melalui kombinasi pengamanan terbuka dan tertutup serta diarahkan pada pencegahan gangguan. Direktur Pamobvit menjelaskan bahwa pengamanan dilaksanakan melalui keterlibatan personel Ditpamobvit, satuan kewilayahan, dan

pengelola objek, dengan fokus pada patroli, pengawasan, dan deteksi dini.

Temuan tersebut diperkuat oleh perspektif pelaksana lapangan. AIPTU David Tangkedatu menjelaskan bahwa personel secara rutin melaksanakan penjagaan, patroli, dan pengawasan aktivitas di sekitar objek vital. Kesiapsiagaan personel dinilai cukup baik karena anggota memperoleh arahan, SOP, dan pembinaan sebelum bertugas, meskipun pelatihan masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi situasi darurat.

Dari sisi pengelola objek, pola pengamanan juga dinilai berjalan cukup baik. Pengelola PT Pertamina menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan secara berlapis mulai dari pengendalian akses, pengawasan area operasional, sampai kontrol aktivitas distribusi BBM. Kerja sama dengan Ditpamobvit berlangsung melalui pengamanan terpadu, patroli bersama, dan koordinasi rutin mengenai situasi keamanan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa strategi pengamanan yang berjalan telah memiliki tiga karakter utama. Pertama, preventif, melalui patroli, pengawasan, dan deteksi dini. Kedua, terpadu, melalui keterlibatan beberapa institusi. Ketiga, adaptif, karena rencana pengamanan disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan dinamika situasi. Informan dari unsur Renmin menjelaskan bahwa perencanaan pengamanan dilakukan berdasarkan analisis kerawanan dan prioritas objek, sedangkan implementasinya dapat disesuaikan ketika situasi keamanan berubah.

Temuan ini sejalan dengan perspektif *critical infrastructure resilience* yang menempatkan kolaborasi antara pemerintah dan pengelola infrastruktur sebagai unsur penting dalam menghadapi risiko dan gangguan terhadap infrastruktur strategis (Ampratwum et al., 2022). Namun, penelitian ini memperlihatkan bahwa kolaborasi formal saja belum cukup. Dalam konteks Papua Tengah, efektivitas pengamanan juga bergantung pada kemampuan aktor untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi geografis dan dinamika ancaman.

Dinamika dan Bentuk Ancaman Keamanan Regional

Hasil analisis menunjukkan bahwa ancaman keamanan terhadap Obvitnas di Papua Tengah bersifat **multidimensional dan fluktuatif**. Bentuk ancaman yang ditemukan meliputi gangguan kelompok bersenjata, sabotase, gangguan sosial, konflik horizontal, serta ancaman nonfisik berupa penyebaran informasi yang berpotensi meningkatkan ketegangan.

Dari perspektif TNI, ancaman tersebut dapat berkembang dari gangguan keamanan menjadi konflik yang lebih terbuka apabila tidak segera ditangani. Informan TNI menjelaskan bahwa eskalasi ancaman dapat menurun atau meningkat sewaktu-waktu bergantung pada kondisi lapangan, sehingga dibutuhkan kesiapsiagaan yang tinggi.

Sementara itu, pemerintah daerah memberikan perspektif yang lebih luas dengan melihat ancaman tidak hanya sebagai persoalan fisik, tetapi juga sebagai fenomena yang dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, dan dinamika politik lokal. Ancaman tersebut berpotensi menghambat pembangunan, investasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat apabila tidak dikelola secara efektif.

Pada sektor energi, ancaman memiliki konsekuensi langsung terhadap operasional. Pengelola PT Pertamina menjelaskan bahwa gangguan keamanan dapat menghambat mobilitas BBM dan distribusi energi, sehingga menimbulkan keterlambatan distribusi, peningkatan biaya pengamanan, serta kebutuhan penyesuaian pola distribusi. Temuan ini memperlihatkan bahwa dampak ancaman tidak berhenti pada aspek keamanan, tetapi dapat menjalar ke aspek operasional dan ekonomi.

Dengan demikian, hasil penelitian menjawab pertanyaan penelitian pertama

sekaligus memperkuat argumentasi bahwa strategi pengamanan Obvitnas di Papua Tengah harus dirancang berdasarkan risk environment yang dinamis. Pengamanan tidak dapat hanya mengandalkan penjagaan objek, tetapi membutuhkan kemampuan membaca perubahan situasi, memperoleh informasi awal, dan melakukan intervensi sebelum ancaman berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

Faktor Penghambat Optimalisasi Pengamanan Obvitnas

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan optimalisasi pengamanan dapat dikelompokkan ke dalam lima faktor utama, yaitu personel, geografis, sarana dan prasarana, anggaran, serta koordinasi dan informasi.

Pertama, keterbatasan personel merupakan persoalan struktural. Direktur Pamobvit menyatakan bahwa jumlah personel masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah Obvitnas yang harus diamankan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Ditpamobvit melakukan penugasan bergilir dan penempatan personel berdasarkan tingkat kerawanan wilayah. Temuan ini menunjukkan bahwa organisasi telah melakukan strategi adaptasi internal, tetapi strategi tersebut belum menghilangkan kesenjangan antara kebutuhan pengamanan dan kapasitas personel.

Kedua, kondisi geografis menjadi faktor yang memperbesar kompleksitas operasional. Personel lapangan menyebutkan bahwa jarak antar titik pengamanan cukup jauh dan kondisi geografis sulit. TNI juga mengidentifikasi kondisi geografis, keterbatasan akses transportasi, dan luasnya wilayah operasi sebagai kendala utama. Dengan demikian, persoalan geografis bukan sekadar persoalan lokasi, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan personel, mobilitas, komunikasi, dan kecepatan respons.

Ketiga, sarana dan prasarana serta teknologi pengamanan masih perlu diperkuat. Direktur Pamobvit menyebut kebutuhan peningkatan CCTV, perangkat komunikasi, dan kendaraan operasional. Pengelola PT Pertamina juga mengidentifikasi perlunya penguatan sistem monitoring digital dan fasilitas pengawasan pada titik rawan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan modernisasi teknologi sebagai kompensasi terhadap keterbatasan jangkauan pengawasan manusia.

Keempat, anggaran menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan organisasi dalam mengembangkan kapasitas pengamanan. Informan dari Ditpamobvit menyatakan bahwa anggaran pada dasarnya mencukupi untuk kegiatan dasar, tetapi masih memerlukan peningkatan untuk teknologi, pelatihan personel, dan fasilitas operasional. Artinya, persoalan anggaran bukan pada ketiadaan pembiayaan, melainkan pada kesesuaian antara alokasi sumber daya dan kebutuhan pengamanan yang bersifat dinamis.

Kelima, koordinasi dan integrasi informasi menjadi persoalan yang relatif lebih subtil. Hampir seluruh informan tidak menggambarkan koordinasi sebagai sesuatu yang gagal. Sebaliknya, koordinasi dinilai telah berjalan baik, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk mempercepat respons dan meningkatkan integrasi informasi. Informan TNI menekankan perlunya peningkatan kecepatan respons dan integrasi informasi, sementara pemerintah daerah menyoroti kebutuhan integrasi data dan respons yang lebih cepat terhadap isu keamanan.

Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa hambatan utama bukan ketiadaan kerja sama, melainkan belum optimalnya integrasi sistem kerja antaraktor. Perspektif ini sejalan dengan Ampratwum et al. (2022), yang menekankan bahwa ketahanan infrastruktur kritis membutuhkan mekanisme kolaborasi yang mampu mengurangi *organizational silos* dan mengintegrasikan sumber daya serta informasi

antarpemangku kepentingan.

Peran Stakeholder dalam Pengamanan Obvitnas

Pengamanan Obvitnas di Papua Tengah menunjukkan karakter multi-stakeholder security governance. Polri berperan sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pengamanan melalui Ditpamobvit dan satuan kewilayahan. TNI memberikan dukungan stabilisasi melalui patroli bersama dan pengamanan terbatas di wilayah rawan. Pemerintah daerah berperan dalam fasilitasi koordinasi dan stabilitas sosial. Pengelola Obvitnas menyediakan sistem keamanan internal dan mendukung kebutuhan operasional. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai mitra sosial dalam menjaga stabilitas lingkungan dan memberikan informasi awal mengenai potensi gangguan.

Dari perspektif TNI, pengamanan Obvitnas berjalan melalui sinergi dengan Polri dan pihak terkait. Bentuk dukungan mencakup patroli bersama dan pengamanan terbatas di wilayah rawan. Dari sisi pemerintah daerah, peran yang dianggap penting adalah memfasilitasi koordinasi antarinstansi dan menciptakan stabilitas sosial agar konflik tidak berkembang menjadi gangguan terhadap Obvitnas.

Perspektif masyarakat memberikan temuan yang menarik. Masyarakat menilai pengamanan telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya rasa aman dan stabilitas aktivitas ekonomi di sekitar Obvitnas. Namun, masyarakat juga mengakui bahwa pelibatan mereka belum maksimal. Mereka mengharapkan komunikasi yang lebih intensif, sosialisasi, pendekatan persuasif, serta pelibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai objek pengamanan. Mereka dapat berfungsi sebagai sumber informasi awal dan mitra pencegahan. Dalam konteks ini, pendekatan humanis bukan sekadar strategi komunikasi, tetapi merupakan bagian dari kapasitas deteksi dini berbasis komunitas. Hal tersebut konsisten dengan kajian Summers (2020), yang menunjukkan bahwa *community policing* dapat berkontribusi pada pengembangan informasi yang mendukung fungsi pencegahan dan intelijen.

Strategi Optimalisasi Pengamanan Obvitnas

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tematik, penelitian menemukan bahwa optimalisasi pengamanan Obvitnas di Papua Tengah membutuhkan pergeseran dari sistem pengamanan yang terpadu secara kelembagaan menuju sistem pengamanan yang benar-benar terintegrasi secara operasional. Perbedaan tersebut penting. Secara kelembagaan, Polri, TNI, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat telah terlibat. Namun, masih terdapat persoalan pada integrasi informasi, kecepatan respons, kapasitas teknologi, dan keterbatasan sumber daya.

Strategi pertama adalah penguatan sinergi lintas sektor. Informan TNI menegaskan bahwa keamanan Obvitnas tidak dapat ditangani oleh satu instansi dan membutuhkan kerja sama solid seluruh pihak terkait. Pemerintah daerah juga mengusulkan forum koordinasi keamanan yang lebih aktif dan terstruktur antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pihak swasta.

Strategi kedua adalah penguatan fungsi intelijen dan deteksi dini. Intelijen dipandang penting karena ancaman di Papua Tengah dapat berubah secara cepat. Informan TNI menyatakan bahwa informasi awal mengenai potensi ancaman memungkinkan tindakan pencegahan dilakukan lebih cepat dan tepat. Dengan demikian, optimalisasi pengamanan perlu mengembangkan sistem yang mampu

mengubah informasi lapangan menjadi dasar pengambilan keputusan secara cepat.

Strategi ketiga adalah peningkatan kapasitas personel. Keterbatasan jumlah personel membuat pengembangan kompetensi menjadi semakin penting. Personel lapangan menilai pelatihan perlu ditingkatkan agar kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat semakin baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi sumber daya manusia tidak hanya dilakukan melalui penambahan jumlah personel, tetapi juga melalui *capacity building*, pelatihan, dan penempatan berdasarkan tingkat risiko.

Strategi keempat adalah modernisasi teknologi pengamanan. Penguatan CCTV terintegrasi, komunikasi digital, pemantauan berbasis data, dan *command center* dipandang dapat mempercepat aliran informasi dan respons terhadap ancaman. Dalam kondisi geografis Papua Tengah, teknologi menjadi penting karena dapat memperluas kemampuan pengawasan melampaui keterbatasan jangkauan personel.

Strategi kelima adalah penguatan pendekatan humanis dan partisipasi masyarakat. Tokoh masyarakat menekankan pentingnya komunikasi yang lebih intensif, pendekatan dialogis, serta pelibatan tokoh adat dan masyarakat. Masyarakat juga menyatakan kesiapan memberikan informasi awal apabila dilibatkan secara baik. Pendekatan tersebut dapat memperkuat legitimasi sosial pengamanan sekaligus meningkatkan kapasitas deteksi dini berbasis masyarakat.

Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas pengamanan Obvitnas di Papua Tengah tidak dapat dijelaskan hanya melalui kapasitas aparat keamanan, tetapi merupakan hasil interaksi antara kapasitas organisasi, kualitas koordinasi, dukungan teknologi, kondisi geografis, karakter ancaman, dan hubungan dengan masyarakat. Temuan ini memperkuat perspektif *critical infrastructure resilience* yang memandang perlindungan objek strategis sebagai persoalan sistemik yang membutuhkan keterlibatan berbagai aktor (Ampratwum et al., 2022).

Temuan pertama menunjukkan bahwa pengamanan telah memiliki karakter preventif melalui patroli, pengawasan, dan deteksi dini. Namun, efektivitas pendekatan tersebut masih dibatasi oleh keterbatasan personel, teknologi, dan kondisi geografis. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara desain strategi pengamanan dan kapasitas implementasi. Ini merupakan temuan penting penelitian karena menunjukkan bahwa strategi yang secara konseptual sudah tepat belum tentu menghasilkan tingkat efektivitas yang sama ketika diterapkan pada lingkungan operasional yang kompleks.

Temuan kedua menunjukkan bahwa ancaman keamanan bersifat multidimensional. Gangguan kelompok bersenjata, sabotase, konflik sosial, gangguan distribusi, serta ancaman informasi tidak dapat ditangani menggunakan satu instrumen keamanan. Karena itu, pendekatan *intelligence-led* menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman sebelum berkembang menjadi gangguan. Pada saat yang sama, pendekatan komunitas diperlukan untuk memperoleh informasi yang berasal dari lingkungan sosial objek. Dalam konteks ini, penguatan intelijen dan pendekatan humanis bukan dua strategi yang saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa koordinasi sudah ada, tetapi integrasi belum optimal. Hampir semua stakeholder mengakui adanya koordinasi, tetapi beberapa informan secara konsisten mengidentifikasi masalah kecepatan respons, integrasi data, dan distribusi informasi. Ini berarti masalah utama berada pada kualitas *inter-organizational coordination*, bukan sekadar keberadaan forum koordinasi. Temuan ini sejalan dengan Ampratwum et al. (2022), yang menunjukkan pentingnya mekanisme

kolaborasi untuk mengurangi fragmentasi kelembagaan dalam pengelolaan risiko infrastruktur kritis.

Temuan keempat berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat memberikan dukungan terhadap pengamanan, tetapi mengharapkan hubungan yang lebih komunikatif dan partisipatif. Hal ini memperlihatkan bahwa stabilitas keamanan di sekitar Obvitnas tidak sepenuhnya dapat dibangun melalui kontrol formal. Wangge (2023) menunjukkan bahwa pendekatan keamanan dalam konteks Papua perlu memperhatikan hubungan dengan masyarakat lokal. Dalam penelitian ini, pendekatan humanis menjadi relevan bukan hanya karena alasan sosial, tetapi juga karena masyarakat dapat menjadi sumber informasi awal dalam sistem deteksi dini.

Dengan demikian, jawaban substantif terhadap seluruh rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan dalam satu proposisi utama, yaitu bahwa pengamanan Obvitnas di Papua Tengah telah berjalan cukup baik melalui pola terpadu dan preventif, tetapi efektivitasnya dibatasi oleh keterbatasan personel, geografis, sarana-prasarana, anggaran, serta integrasi informasi. Oleh karena itu, optimalisasi tidak cukup dilakukan dengan menambah kekuatan pengamanan, tetapi harus diarahkan pada pengembangan sistem pengamanan yang adaptif dan kolaboratif, melalui sinergi lintas sektor, intelijen dan deteksi dini, peningkatan kapasitas personel, modernisasi teknologi, integrasi informasi, serta pendekatan humanis kepada masyarakat. Temuan tersebut secara langsung mendukung model konseptual penelitian yang telah disusun sebelumnya.

Tabel 5. Sintesis Jawaban atas Rumusan Masalah

Rumusan Masalah	Temuan Utama	Jawaban Penelitian
Bagaimana strategi pengamanan terbuka dan pengamanan Obvitnas tertutup, patroli, pengawasan, oleh Ditpamobvit intelijen, deteksi dini, dan Polda Papua Tengah?	koordinasi lintas sektor	Strategi telah berjalan cukup baik dan terstruktur, dengan orientasi preventif dan terpadu
Apa faktor penghambat optimalisasi?	Personel terbatas, geografis sulit, sarana-prasarana dan teknologi belum optimal, anggaran terbatas, serta integrasi informasi belum maksimal	Hambatan bersifat multidimensional dan saling berkaitan
Bagaimana strategi optimal dan adaptif?	Sinergi lintas sektor, intelijen, peningkatan kapasitas personel, teknologi, integrasi informasi, dan pendekatan humanis	Dibutuhkan sistem pengamanan adaptif dan kolaboratif yang mengintegrasikan people, intelligence, technology, coordination, dan community engagement

Penelitian ini tidak menemukan bahwa sistem pengamanan Obvitnas di Papua Tengah “gagal”. Sebaliknya, data menunjukkan sistem telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat *capacity gap* antara tuntutan lingkungan keamanan dan kapasitas pengamanan yang tersedia. Justru pada titik inilah kontribusi utama penelitian menjadi lebih kuat, karena optimalisasi yang ditawarkan bukan penggantian total sistem yang ada, melainkan penguatan dan integrasi sistem pengamanan yang telah berjalan menjadi lebih responsif, berbasis informasi, adaptif terhadap risiko, dan kolaboratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi strategi pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Papua Tengah dalam menghadapi ancaman keamanan regional, dapat disimpulkan bahwa pengamanan Obvitnas di Papua Tengah secara umum telah berjalan cukup baik dan terstruktur melalui pola pengamanan terpadu. Pelaksanaan pengamanan melibatkan Ditpamobvit Polda Papua Tengah, TNI, pemerintah daerah, pengelola Obvitnas, serta dukungan masyarakat. Strategi yang diterapkan mencakup pengamanan terbuka dan tertutup, patroli, pengawasan, deteksi dini, serta koordinasi lintas sektor. Meskipun demikian, efektivitas pengamanan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan personel, sarana dan prasarana, serta kondisi geografis yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengamanan.

Ancaman keamanan terhadap Obvitnas di Papua Tengah menunjukkan karakter yang kompleks, multidimensional, dan fluktuatif. Ancaman tidak hanya berupa gangguan kelompok bersenjata dan sabotase terhadap objek vital, tetapi juga mencakup konflik sosial, potensi konflik horizontal, serta ancaman nonfisik berupa penyebaran isu yang dapat memengaruhi stabilitas keamanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengamanan Obvitnas tidak dapat hanya berorientasi pada penjagaan fisik, tetapi membutuhkan kemampuan deteksi dini, kesiapsiagaan berkelanjutan, serta kemampuan menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan keamanan.

Faktor penghambat utama dalam optimalisasi pengamanan meliputi keterbatasan jumlah personel, kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah, keterbatasan sarana-prasarana dan teknologi, keterbatasan anggaran operasional, serta belum optimalnya koordinasi dan pertukaran informasi antarlembaga. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan pengamanan bukan semata-mata terletak pada keberadaan atau ketiadaan koordinasi, karena sinergi antarlembaga pada dasarnya telah berjalan, tetapi pada kualitas integrasi informasi, kecepatan respons, dan kemampuan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara tuntutan lingkungan keamanan yang kompleks dengan kapasitas pengamanan yang tersedia.

Oleh karena itu, optimalisasi strategi pengamanan Obvitnas di Papua Tengah perlu diarahkan pada pembangunan sistem pengamanan yang adaptif, terpadu, dan kolaboratif. Strategi tersebut mencakup penguatan sinergi Polri, TNI, pemerintah daerah, dan pengelola Obvitnas; optimalisasi fungsi intelijen dan deteksi dini; peningkatan jumlah serta kapasitas personel melalui pelatihan berkelanjutan; modernisasi teknologi pengamanan dan sistem komunikasi terpadu; serta penguatan pendekatan humanis melalui komunikasi dan pelibatan tokoh masyarakat serta masyarakat lokal. Dengan strategi tersebut, pengamanan Obvitnas diharapkan tidak hanya mampu merespons gangguan yang telah terjadi, tetapi juga meningkatkan kemampuan pencegahan, deteksi dini, dan adaptasi terhadap perkembangan ancaman keamanan regional.

Secara substantif, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi pengamanan Obvitnas bukan berarti mengganti sistem yang telah berjalan, melainkan memperkuat integrasi antara personel, intelijen, teknologi, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pengamanan Obvitnas di Papua Tengah sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem keamanan yang responsif terhadap dinamika ancaman sekaligus sesuai dengan karakteristik geografis dan sosial wilayah Papua Tengah. Kesimpulan ini konsisten dengan temuan utama penelitian bahwa pengamanan telah berjalan cukup

baik, tetapi masih memerlukan penguatan yang bersifat terpadu, adaptif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuh informan yang dipilih secara purposive, sehingga temuan penelitian terutama merepresentasikan pengalaman, persepsi, dan pengetahuan aktor yang terlibat langsung dalam sistem pengamanan Obvitnas di Papua Tengah. Meskipun komposisi informan telah mencakup unsur kepolisian, TNI, pengelola Obvitnas, pemerintah daerah, dan masyarakat, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik kepada seluruh Obvitnas di Indonesia. Dalam penelitian kualitatif, kekuatan temuan lebih terletak pada kedalaman dan kekayaan informasi kontekstual daripada generalisasi statistik.

Kedua, penelitian dilakukan dalam konteks Papua Tengah yang memiliki karakter geografis, sosial, dan keamanan yang sangat spesifik. Kondisi wilayah yang mencakup daerah pegunungan, pesisir, akses transportasi yang terbatas, serta dinamika ancaman yang fluktuatif dapat memengaruhi pola pengamanan dan kapasitas respons aparat. Oleh sebab itu, strategi optimal yang dihasilkan penelitian ini perlu dipahami dalam konteks Papua Tengah dan tidak dapat secara langsung diasumsikan memiliki efektivitas yang sama apabila diterapkan pada wilayah lain dengan karakter ancaman dan geografis yang berbeda.

Ketiga, penelitian lebih menekankan perspektif kelembagaan dan pengalaman para stakeholder mengenai strategi pengamanan, ancaman, hambatan, koordinasi, dan optimalisasi. Penelitian belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat efektivitas masing-masing strategi, misalnya hubungan antara jumlah personel, intensitas patroli, penggunaan teknologi, kecepatan respons, dan tingkat kejadian gangguan keamanan. Dengan demikian, pernyataan bahwa pengamanan telah berjalan “cukup baik” terutama merupakan hasil interpretasi kualitatif berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, bukan pengukuran efektivitas menggunakan indikator kuantitatif. Temuan tesis sendiri menunjukkan bahwa pengamanan telah berjalan cukup baik tetapi belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya dan kompleksitas ancaman.

Keempat, karakter ancaman keamanan yang dinamis dan sensitif menjadi keterbatasan tersendiri dalam memperoleh informasi yang sepenuhnya komprehensif mengenai pola, intensitas, dan perkembangan ancaman. Informasi keamanan tertentu memiliki tingkat sensitivitas sehingga tidak seluruh data operasional dapat diakses atau dipublikasikan dalam artikel ilmiah. Akibatnya, analisis penelitian lebih berfokus pada pola umum ancaman, strategi pengamanan, faktor penghambat, dan kebutuhan optimalisasi daripada mengungkapkan informasi operasional yang bersifat sensitif.

Kelima, penelitian ini telah menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, *member check*, dan *audit trail* untuk meningkatkan kredibilitas data. Namun, penelitian tetap memiliki keterbatasan inheren penelitian kualitatif, yaitu adanya kemungkinan subjektivitas dalam proses interpretasi data wawancara dan pengelompokan tema. Hal ini terutama relevan karena analisis penelitian bergantung pada proses interpretasi terhadap pengalaman dan persepsi informan. Penerapan *audit trail* dan triangulasi telah dilakukan untuk meningkatkan keterlacakan serta kredibilitas proses analisis, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinan interpretasi subjektif.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokasi dan informan dengan melibatkan lebih banyak Obvitnas dari berbagai sektor serta stakeholder yang lebih beragam. Penelitian komparatif antara beberapa kabupaten di Papua Tengah atau antara Papua Tengah dengan provinsi lain dapat dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan strategi pengamanan berdasarkan karakter geografis, sosial, dan tingkat ancaman. Pendekatan tersebut akan membantu menentukan apakah temuan penelitian ini bersifat spesifik terhadap Papua Tengah atau memiliki relevansi yang lebih luas.

Penelitian selanjutnya juga disarankan mengembangkan mixed-methods research dengan mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur efektivitas strategi pengamanan melalui indikator seperti rasio personel terhadap objek, frekuensi patroli, waktu respons, cakupan CCTV, jumlah gangguan keamanan, frekuensi koordinasi, serta tingkat persepsi keamanan pengelola dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mampu menjelaskan *bagaimana* dan *mengapa* strategi pengamanan dilakukan, tetapi juga dapat mengukur *seberapa efektif* strategi tersebut.

Selanjutnya, penelitian mendatang dapat secara khusus menguji peran teknologi dan sistem informasi dalam meningkatkan efektivitas pengamanan Obvitnas. Hal ini relevan karena penelitian menemukan bahwa keterbatasan sarana teknologi merupakan salah satu hambatan utama, sementara modernisasi CCTV, sistem komunikasi terpadu, dan pemantauan berbasis data menjadi salah satu strategi yang direkomendasikan. Penelitian berikutnya dapat mengevaluasi apakah penerapan *integrated monitoring system*, *command center*, atau teknologi pengawasan lainnya benar-benar mampu meningkatkan deteksi dini dan memperpendek waktu respons.

Penelitian selanjutnya juga perlu memperdalam model kolaborasi lintas sektor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, pengelola Obvitnas, dan masyarakat telah berjalan, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan integrasi informasi dan kecepatan respons. Oleh karena itu, studi mendatang dapat menggunakan perspektif *collaborative governance*, *network governance*, atau *security governance* untuk menganalisis struktur hubungan antarlembaga, mekanisme pertukaran informasi, pembagian kewenangan, kepercayaan antaraktor, serta faktor yang menentukan keberhasilan koordinasi.

Selain itu, penelitian berikutnya disarankan untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap peran masyarakat dan institusi lokal, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh adat, dalam sistem deteksi dini dan pencegahan konflik. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi mitra penting dalam menjaga stabilitas keamanan, sementara pendekatan sosial dan komunikasi yang baik dapat membantu mencegah konflik. Kajian mendatang dapat mengembangkan model *community-based security* yang mengintegrasikan kapasitas formal aparat keamanan dengan pengetahuan lokal dan jejaring sosial masyarakat.

Terakhir, penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi longitudinal untuk melihat perubahan strategi pengamanan dan pola ancaman dari waktu ke waktu. Pendekatan ini penting karena ancaman keamanan di Papua Tengah bersifat fluktuatif dan dapat berubah mengikuti perkembangan sosial, politik, ekonomi, serta kondisi keamanan wilayah. Studi longitudinal memungkinkan peneliti mengevaluasi apakah penguatan personel, teknologi, intelijen, koordinasi, dan pendekatan humanis benar-benar menghasilkan peningkatan efektivitas pengamanan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, agenda penelitian selanjutnya sebaiknya bergerak dari deskripsi strategi menuju pengujian efektivitas strategi. Dengan demikian, penelitian mengenai pengamanan Obvitnas dapat berkembang dari sekadar mengidentifikasi hambatan dan merumuskan rekomendasi menjadi pengembangan model pengamanan Obvitnas yang dapat diuji, dibandingkan, dan direplikasi pada konteks wilayah dengan karakter ancaman yang berbeda. Ini akan memperkuat kontribusi akademik penelitian sekaligus meningkatkan nilai praktisnya bagi pengembangan kebijakan pengamanan Obvitnas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampratwum, G., Osei-Kyei, R., & Tam, V. W. Y. (2022). Exploring the concept of public-private partnership in building critical infrastructure resilience against unexpected events: A systematic review. *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, 39, 100556. <https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2022.100556>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Gobai, S., Todingbua, M. A., & Corvis, L. (2025). Evaluasi Manajemen Prosedur Penanganan Anak Terlantar di Panti Asuhan Siloam Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 120–127. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/885>
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Sanggenafa, M., Lambe, K. H. P., & Baka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota: Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Kelembagaan. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 22–28. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.300>
- Summers, J. (2020). Trust through intelligence? Exploring the nexus between community and counter-terrorism policing. *Contemporary Challenges: The Global Crime, Justice and Security Journal*, 1, 108–125. <https://doi.org/10.2218/ccj.v1.4946>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wangge, H. R. (2023). Securitization of a political conflict in Southeast Asia: Disengaging the indigenous audience in West Papua. *Asian Security*, 19(3), 207–227. <https://doi.org/10.1080/14799855.2023.2225419>